

**PENGARUH PENGANGGURAN, PENGELUARAN PEMERINTAH,
PENDIDIKAN, RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP
KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI 2011-2018**

Ni Kadek Mega Dwi Lestari¹ I Ketut Sudibia²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia e-mail: megaalestari99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, rasio ketergantungan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan rasio ketergantungan secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, menggunakan metode data sekunder dan data primer sebagai pendukung penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan, dokumentasi, dan wawancara mendalam sebagai metode pendukung. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengangguran, pengeluaran pemerintah, rasio ketergantungan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan rasio ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, rasio ketergantungan, kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the unemployment rate, government spending, education level, dependency ratio partially influence the poverty level in the Regency / City of Bali Province, and to analyze how much influence unemployment, government spending, education level, and dependency ratio simultaneously affect poverty. in the Regency / City of the Province of Bali. This research was conducted in regencies / cities in Bali Province, using secondary data methods and primary data to support this research. Methods of data collection using non-participant observation, documentation, and in-depth interviews as supporting methods. The analysis technique uses multiple linear regression. The results showed that unemployment, government spending, the dependency ratio partially had a significant positive effect on the poverty level, while the education level partially had a negative and significant effect on poverty. Simultaneously unemployment, government spending, education level, and dependency ratio have a significant positive effect on poverty.

Keywords: *unemployment, government spending, education levels, dependency ratio, poverty*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan perdebatan tentang kemiskinan bukanlah masalah baru dan masih menantang di Indonesia (Deffi Ayu, 2010). Menurunkan angka kemiskinan tidak hanya melalui pendekatan ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena untuk menanggulangi kemiskinan tersebut masalah yang dihadapi tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat dari timbulnya kemiskinan, tetapi juga melibatkan perbedaan pendapat, nilai dan politik (Purnama Margareni, dkk, 2016).

Kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamannya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, dan pada jangka yang lebih panjang dapat mengakibatkan hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara (Made Kembar Sri Budhi, 2013).

Kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Masalah

kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pengangguran, pendidikan, kesehatan, tingkat kesempatan kerja, konsumsi, lokasi, dan lingkungan (Adi Putra, 2017).

Menurut Michael P. Todaro (2006) pengertian mengenai arti dari kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut telah merambat pada level multidimensional, artinya kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan. Salah satunya mengemukakan kemiskinan absolut, yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) mengidentifikasi kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalisme, pengangguran, prostitusi, dan masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk.

Baiq Tisnawati (2012) menyatakan bahwa akar dari permasalahan tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu tingginya perbedaan antar daerah dan golongan masyarakat akibat kurang meratanya distribusi pendapatan, sehingga terjadi kesenjangan terhadap masyarakat kaya dan miskin di Indonesia yang semakin luas. Pemerintah mengupayakan penanggulangan

kemiskinan dari tahun ke tahun, namun kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak mengalami penurunan, menurut data BPS adanya kecenderungan penurunan terhadap kemiskinan tetapi secara kualitatif belum menunjukkan perubahan yang nyata dan justru kondisi tersebut semakin buruk setiap tahunnya. Yao (2007) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi. Penjelasan akan kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya pendapatan, pangan, papan, kesempatan kerja, atau yang berbasis aset fisik seperti hewan ternak dan lahan.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik, 2010) penyebab kemiskinan dibagi menjadi 2 yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi akibat adanya adat istiadat atau budaya daerah yang mengikat masyarakatnya dan menjadikan masyarakatnya tetap lekat dengan garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi akibat lemahnya daya saing seseorang dalam menghadapi tatanan sosial yang tidak adil dan menyebabkan seseorang terperangkap dalam garis kemiskinan.

Provinsi Bali merupakan wilayah yang memiliki perekonomian yang cukup pesat atau berkembang, tetapi ditengah berkembangnya perekonomiannya jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Keadaan ini terlihat masih banyaknya masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, kekurangan sandang, pangan, dan papan. Pada kondisi seperti ini peran pemerintah sangat dibutuhkan guna mengatasi kemiskinan yang

terjadi serta tingkat kemiskinan ini tidak hanya dipandang melalui tinggi rendahnya suatu perekonomian, melainkan dipandang dari sudut yang berbeda-beda.

Menurut Asep Suryahadi, dkk (2020), kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan pengeluaran rumah tangga. Ini dapat dicapai dengan memperkirakan korelasi antara perubahan pertumbuhan ekonomi dan perubahan rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita. Mengingat sebagian besar dampak wabah terhadap kemiskinan terjadi melalui para pekerja kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka, cara efektif untuk menghentikan peningkatan kemiskinan salah satunya adalah dengan mencegah pekerja dari pemecatan sejak awal, salah satu caranya dengan memberikan subsidi upah untuk membantu perusahaan membayar upah, paling tidak sebagian. Kebijakan ini harus difokuskan pada industri padat karya, dan perusahaan yang menerima subsidi upah harus menandatangani kontrak dengan pemerintah yang menetapkan bahwa mereka tidak akan memberhentikan pekerjanya.

Cutler dan Katz (1991) menganalisis pengaruh variabel ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan, hasilnya bahwa pengangguran memberi pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, pemenuhan hak dasar atas pekerja yang layak ditentukan dari ketersediaan lapangan kerja yang dapat diakses, kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan

usaha, serta melindungi pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian kerja.

Masyarakat miskin umumnya memiliki masalah dalam mendapatkan kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan (Astrini, 2013).

Permasalahan utama yang dihadapi dari dulu hingga sekarang ini adalah tingginya tingkat pengangguran akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Masalah pengangguran ini memang menjadi suatu permasalahan dalam perekonomian Indonesia. Jumlah angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya membuat semakin banyak jumlah pesaing yang menginginkan pekerjaan. Penyebab pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kenaikan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Kenaikan jumlah angkatan kerja ini sangat tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, dan tidak seimbang dengan pendidikan yang kurang memadai sehingga tidak dapat diterjunkan langsung ke lapangan pekerjaan. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada jumlah pengangguran di Indonesia yang akan terus meningkat.

Menurut Sukirno (1997) dengan adanya penurunan pengangguran maka akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Pengangguran yaitu suatu kondisi seseorang yang masi dikatakan tergolong angkatan kerja berusaha memperoleh pekerjaan namun belum juga memperolehnya.

Selain itu, pendapatan seseorang mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan yang terjadi dengan cara apabila rumah tangga mempunyai batas likuiditas yang menunjukkan bahwa konsumsi atau pengeluaran seseorang dapat dipengaruhi terhadap pendapatan. Serta kemiskinan bukan hanya dilihat dari segi ekonomi melainkan sudah mengalami perluasan hingga segi sosial, kesehatan, politik, pendidikan (Aristina, 2015).

Tidak hanya di Indonesia, provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia juga tidak luput dari persoalan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di provinsi Bali menurut kabupaten atau kota mengalami penurunan pada tahun 2012. Pada tahun 2014 naik menjadi 196.00 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2011-2018 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011- 2018

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	17.60	15.30	14.92	15.80	15.83	14.53	14.78	14.35
Tabanan	24,20	21.00	22.49	24.40	24.05	21.90	21.66	19.77
Badung	14.60	12.51	14.55	15.40	14.40	12.91	13.16	12.97
Gianyar	26.00	22,63	20.80	22.50	22.89	22.13	22.42	21.26
Klungkung	10.70	9.30	12.21	12.30	12.11	11.21	11.15	10.43
Bangli	11.40	9.90	12.00	13.00	12.74	11.66	11.76	11.05
Karangasem	26.10	22.68	27.85	29.70	30.33	27.12	27.02	26.02
Buleleng	37.90	32.96	40.32	43.70	43.43	37.55	37.48	35.20
Denpasar	14.50	12.66	17.63	19.20	20.94	19.17	20.70	20.72
Provinsi Bali	183.10	158.95	182.77	196.00	196.71	178.18	180.13	171.76

Sumber :BPS Provinsi Bali, 2019

Tabel 1 merupakan data jumlah kemiskinan yang terjadi di

Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2018. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebesar 158.95 jiwa penduduk miskin sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 182.77 dan di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 178.18 dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin naik sebesar 180.13 kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali masih mengalami fluktuasi.

Pembangunan manusia yaitu identik dengan penurunan kemiskinan. Berinvestasi pada bidang kesehatan dan pendidikan jauh lebih berarti bagi penduduk miskin dibanding penduduk tidak miskin, dikarenakan bagi masyarakat miskin aset terpenting bagi mereka ialah SDM yang berkualitas yang dimiliki seseorang (Aristina, 2015).

Penyebab kemiskinan begitu beragam di berbagai negara. Bahkan masalah kemiskinan seperti kurangnya ketersediaan kebutuhan pokok merupakan faktor yang sangat penting yang dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan. Ada berbagai hal yang menjadi faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, salah satunya tingkat pendidikan yang masih rendah, lapangan kerja yang terbatas dan kurang memadai, ketidakpedulian terhadap keadaan sosial di sekitar, keterbatasan sumber daya alam maupun sumber modal, dan lain sebagainya.

Isu-isu mengenai kemiskinan merupakan fokus pembangunan di setiap negara di dunia. Perhatian terhadap kemiskinan bahkan menjadi isu

global yang terungkap secara tegas dalam sasaran-sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals, MDGs). MDGs menetapkan sebagai sasaran utamanya adalah penghapusan kemiskinan ekstrim(*exteme poverty*) dan kelaparan pada tahun 2015. Target ini menjadi acuan kemajuan suatu negara. Sekalipun sudah merupakan komitmen global, upaya penanggulangan kemiskinan disadari bukan merupakan hal sederhana, karena kemiskinan bersifat kompleks (Yoghi Citra, 2014). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memungkinkan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan.

Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari pengeluaran pemerintah yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memungkinkan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang bersifat multidimensional dan merupakan bagian yang selalu muncul dalam

kehidupan masyarakat pada umumnya (Rai Narka, 2019).

Pemerintah dewasa ini sudah memberikan program-program pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Demikian juga Provinsi Bali, yang dikenal dengan destinasi pariwisata tidak luput dari masalah kemiskinan tersebut (BPS Provinsi Bali, 2012).

Salah satu hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi ialah pengeluaran pemerintah yang dimana ini merupakan tolak ukur bagi pemerintah langkah apa saja yang diambil guna mensejahterakan masyarakatnya melalui berbagai program daerah yang ada. Besarnya pengeluaran pemerintah maka akan berdampak positif terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mampu memerangi angka kemiskinan.

Tingkat kemiskinan sudah menjadi permasalahan yang umum dan kompleks diberbagai belahan dunia. Dengan mengupayakan pemberantasan kemiskinan perlu dilakukan dengan meningkatkan SDM guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kemiskinan akan berhasil apabila pemerintah serta masyarakat ikut serta dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi seperti tercapainya pembangunan di berbagai sektor. Serta melalui program-program yang telah disiapkan guna menunjang kualitas SDM yang tersedia yang mampu mengasah kemampuan

guna bersaing dalam kancah masyarakat dan membantu menyelesaikan program pemerintahan.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Serta dipengaruhi dengan peran SDM yang tersedia di masyarakat yang diharapkan mampu ikut serta dalam keberhasilan peningkatan perekonomian (Putri Wahyuni, 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis tingkat pengangguran berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2) Untuk menganalisis pengeluaran pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 3) Untuk menganalisis tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 4) Untuk menganalisis rasio ketergantungan berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dan 5) Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan rasio ketergantungan secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota provinsi Bali. Alasan memilih kabupaten/kota provinsi Bali karena berdasarkan data BPS kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali masih menunjukkan kesenjangan yang lebar antara kabupaten/kota di provinsi Bali. Obyek penelitian ini adalah kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Bali dan dilihat dari segi tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan rasio ketergantungan.

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini ialah kemiskinan (Y). Kemiskinan (Y) adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan atau dengan kata lain Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Pengukurannya dalam satuan persen.

Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini ialah pengangguran (X_1) penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menurut Sukirno adalah jumlah tenaga kerja dalam

perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya dan diukur dalam satuan persen.

Pengeluaran pemerintah (X_2) kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat atau dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Variabel ini diukur dalam jutaan rupiah.

Sedangkan tingkat pendidikan (X_3) Secara umum pendidikan adalah suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan serta membuat seseorang mampu lebih kritis dalam berpikir. Variabel ini diukur melalui rata-rata lama sekolah dinyatakan dalam tahun.

Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* (X_4) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan diartikan sebagai ukuran dari porsi populasi yang terdiri dari tanggungan (orang yang terlalu muda atau terlalu tua untuk bekerja). Rasio ketergantungan juga merupakan perbandingan antara penduduk non produktif (umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) pengukurannya dalam satuan persen.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka atau dengan kata lain dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur meliputi pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, rasio ketergantungan dan persentase penduduk miskin. Data kualitatif yaitu data yang tidak menggunakan angka melainkan lebih mengacu berupa gambaran, atau keterangan secara ilmiah dan teoritis baik secara ekonomi maupun secara non ekonomi, pada penelitian ini data kualitatif diperoleh melalui hasil publikasi, baik buku literatur maupun

jurnal yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan, dokumentasi, serta pedoman dalam wawancara mendalam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian. Data primer yang dikumpulkan sebagai data pendukung dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara mengenai fenomena kemiskinan yang ada di Provinsi Bali. Data sekunder adalah data yang sudah ada lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan orang lain atau dari pihak lain di luar penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan, antara lain bersumber dari BPS.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear berganda. Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kemiskinan
- X1 = Pengangguran
- X2 = Pengeluaran Pemerintah

- X3 = Tingkat Pendidikan
 X4 = Rasio Ketergantungan
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi
 β_0 = Konstanta/intersep
 e = Pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linier berganda ini dipergunakan untuk menganalisis pengaruh Pengangguran (X1), Pengeluaran pemerintah (X2), Tingkat pendidikan (X3), dan Rasio ketergantungan (X4) terhadap Tingkat kemiskinan (Y). Dari analisis data yang dilakukan maka diperoleh hasil uji analisis regresi linier berganda seperti ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-12.743	1.39		-9.168	0
	Pengangguran(X1)	0.096	0.03	0.172	3.166	0.002
	Pengeluaran Pemerintah(X2)	0.204	0.064	0.17	3.199	0.002
	Tingkat Pendidikan(X3)	-0.213	0.049	-0.257	-4.349	0
	Rasio Ketergantungan (X4)	2.701	0.226	0.737	11.976	0

Sumber: Data diolah, 2020

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 2 tersebut, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = -12,743 + 0,096X_1 + 0,204X_2 - 0,213 X_3 + 2,701 X_4 + \varepsilon$$

Nilai koefisien regresi variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian ini yang terdiri dari Pengangguran (X1), Pengeluaran pemerintah (X2), Tingkat pendidikan (X3) dan Rasio ketergantungan (X4) memiliki pengaruh yang terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Nilai koefisien regresi variabel pengangguran bertanda positif berarti nilai koefisien regresi variabel pengangguran sebesar 0,096 artinya setiap kenaikan pengangguran 1% maka akan meningkatkan jumlah tingkat kemiskinan di Kabupaten /Kota Provinsi Bali sebesar 0,096%.

Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah bertanda positif berarti nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,204 artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah 1% maka akan meningkatkan jumlah tingkat kemiskinan di Kabupaten /Kota Provinsi Bali sebesar 0,204%.

Nilai koefisien regresi variabel Tingkat Pendidikan bertanda negatif berarti nilai koefisien regresi variabel pendidikan sebesar -0,213 artinya setiap kenaikan pendidikan 1% maka akan ada penurunan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten /Kota Provinsi Bali sebesar 0,213%.

Nilai koefisien regresi variabel rasio ketergantungan sebesar 2,701 artinya setiap kenaikan rasio ketergantungan 1% maka akan meningkatkan jumlah tingkat kemiskinan di Kabupaten /Kota Provinsi Bali sebesar 2,701%.

Uji normalitas**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	0.17333951
Most Extreme Differences	Absolute	0.122
	Positive	0.054
	Negative	-0.122
Test Statistic		1.036
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.233

Sumber: Data diolah, 2020

Hasil pengujian pada persamaan regresi linear berganda dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,233 lebih besar dari *level of significant*, yaitu 5 persen (0,05).

Uji multikolinearitas**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengangguran (X ₁)	0,847	1,180	Bebas Multikolinieritas
Pengeluaran pemerintah (X ₂)	0,884	1,131	Bebas Multikolinieritas
Tingkat pendidikan (X ₃)	0,715	1,398	Bebas Multikolinieritas
Rasio ketergantungan (X ₄)	0,658	1,519	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai VIF dan *Tolerance*, dimana diperlihatkan bahwa tidak terdapat nilai *Tolerance* yang kurang dari 0,1 (10 persen) ataupun nilai VIF yang tidak lebih dari 10. Oleh karena itu

berdasarkan nilai *Tolerance* dan VIF pada model analisis tersebut tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Suatu model regresi jika mengandung gejala autokorelasi, maka prediksi yang dilakukan dengan model tersebut akan tidak baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang menyimpang. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW-test) atau *d* statistik terhadap variabel pengganggu (*disturbance error term*).

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913 ^a	0.833	0.823	0.17844	1.669

Sumber: Data diolah, 2020

Nilai DW 1,669, nilai ini bila dibandingkan dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 72 (*n*) dan jumlah variabel independen (*K*=4) maka diperoleh nilai *du* 1,7366. Nilai DW 1,669 kurang dari batas atas (*du*) yakni 1,7366 dan kurang dari (*4-du*) $4-1,7366 = 2,2634$.

Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak lolos uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson test. Oleh karena nilai autokorelasi pada uji Durbin-Watson test tidak memenuhi kriteria, maka dilakukan uji autokorelasi dengan Run Test. Model regresi dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai *Aymp.Sig* (2-tailed) pada uji Run Test memiliki nilai lebih dari 0,05.

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0.03203
Cases < Test Value	36
Cases \geq Test Value	36
Total Cases	72
Number of Runs	38
Z	0.237
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.812

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 6 menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp.Sig (2-tailed) pada uji Run Test sebesar 0,812 yang lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar nilai residual.

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Simpulan
Pengangguran (X_1)	0,289	Bebas Heteroskedastisitas
Pengeluaran pemerintah (X_2)	0,405	Bebas Heteroskedastisitas
Tingkat pendidikan (X_3)	0,884	Bebas Heteroskedastisitas
Rasio ketergantungan (X_4)	0,445	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Pengangguran (X_1) sebesar 0,289, Pengeluaran pemerintah (X_2) sebesar 0,405, Tingkat pendidikan (X_3) sebesar 0,884 dan Rasio ketergantungan (X_4) sebesar 0,445. Hasil uji tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari $\alpha = 0.05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan rasio ketergantungan secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2018 (dengan Uji ANOVA)

Hasil analisis uji statistik dengan menggunakan program SPSS diperoleh bahwa nilai F hitung sebesar 83,402 dengan nilai signifikansi P value 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Dengan taraf nyata (α) = 0,05 ; Ftabel = 2,51 , Fhitung = 83,402 dan nilai signifikan F hitung sebesar 0,000 < dari (α) = 5 persen atau 0,05, dengan demikian maka Fhitung = 83,402 > 2,51 maka H0 di tolak dan Hi diterima, yang artinya variabel pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan rasio ketergantungan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2011-2018.

Hasil ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,823 yang memiliki arti bahwa 82,3 ini berarti bahwa naik turunnya variabel kemiskinan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengangguran, pengeluaran pemerintah, tingkat pendidikan, dan rasio ketergantungan sebesar 82,3 persen sedangkan 17,7 persen sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pengujian pengaruh koefisien X_1 (pengangguran) terhadap kemiskinan

Dengan taraf nyata (α) = 0,05 ; t tabel = 1,667 , t hitung = 3,166 dan nilai signifikan t hitung sebesar 0,002 dengan demikian maka t hitung = 3,166 > 1,667 maka H0 di tolak dan Hi diterima dan nilai signifikansi 0,002 < dari (α) = 5 persen atau 0,05 maka H0 di tolak dan Hi diterima.

Hasil perhitungan uji t tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi X_1 atau Pengangguran adalah sebesar 0,096 yaitu bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 kurang dari 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, maka hipotesis pertamaditerima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Diah dan Harstuti (2014) bahwa pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya ketika pengangguran meningkat akan diikuti pula oleh peningkatan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat pengangguran juga harus diturunkan, pengurangan angka kemiskinan akan berhasil apabila lapangan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja yang ada, terutama pada sektor padat karya dan menyebar pada setiap golongan pendapatan, termasuk digolongkan penduduk miskin.

Pengujian pengaruh koefisien X_2 (pengeluaran pemerintah) terhadap kemiskinan

Dengan taraf nyata (α) = 0,05 ; t tabel = 1,667 , t hitung = 3,199 dan nilai signifikan t hitung sebesar 0,002 dengan demikian maka t hitung = 3,199 > 1,667 maka H_0 di tolak dan H_1 diterima dan nilai signifikansi 0,002 < dari (α) = 5 persen atau 0,05 maka H_0 di tolak dan H_1 diterima.

Hasil perhitungan uji t tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi X_2 atau pengeluaran pemerintah adalah sebesar 0,204 yaitu bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 kurang dari 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan

terhadap Tingkat kemiskinan, maka hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada salah satu responden yaitu Bapak Ketut Suteja Kumara pada tanggal 20 Desember 2020, menyatakan bahwa:

“kemiskinan tidak bisa dilihat secara parsial tetapi kemiskinan itu disebabkan oleh satu faktor saja yang menyebabkan kemiskinan itu *combined* atau gabungan antara beberapa faktor individu yang tentunya di topang oleh tingkat pendidikan, lingkungan, modal, dan faktor yang lebih besar lagi faktor pemerintah. Apakah pemerintah berkontribusi terhadap kemiskinan atau berkontribusi terhadap kesejahteraan tentu ini dilihat dari program-program yang digulirkan oleh pemerintah. Sampai saat ini sebelum pandemi khususnya kita melihat sudah banyak program-program yang digulirkan oleh pemerintahan Provinsi dan pemerintah Kota mengacu kepada program-program bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas, dan ini juga merupakan tanggung jawab semuanya baik itu swasta, masyarakat muda ataupun tua bagaimana kita mampu mengikis kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”.

Pengujian pengaruh koefisien X_3 (tingkat pendidikan) terhadap kemiskinan

Dengan taraf nyata (α) = 0,05 ; t tabel = 1,667 , t hitung = -4,349 dan nilai signifikan t hitung sebesar 0,000 dengan demikian maka t hitung = -4,349 < 1,667 maka H_0 di tolak dan H_1 diterima dan nilai signifikansi 0,000 < dari (α) = 5 persen atau 0,05 maka H_0 di tolak dan H_1 diterima.

Hasil perhitungan uji t tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi X_3 atau Tingkat pendidikan adalah bernilai negatif sebesar -0,213 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, maka hipotesis ketiga diterima.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Adriani dan Wahyudi (2015) Koefisien regresi persamaan memiliki tanda negatif untuk variabel tingkat pendidikan, ini berarti terdapat hubungan yang berlawanan arah antara variabel tersebut terhadap kemiskinan, dengan kata lain jika tingkat pendidikan meningkat maka kemiskinan akan menurun. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada salah satu responden yaitu Bapak Nyoman Punia 18 Desember 2020, menyatakan bahwa:

“Kemiskinan itu merupakan suatu hal yang fenomenal, dimana kemiskinan tersebut terutama di wilayah kita Kabupaten/Kota Provinsi Bali, di daerah terpencil itu ada karena masyarakatnya belum bisa menikmati kehidupannya dengan layak karena terbatasnya keterampilan yang seseorang miliki itu yang menjadi penyebab rentannya seseorang terjatuh dalam kemiskinan. Tingkat pendidikan seseorang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM guna mampu bersaing di masyarakat sehingga pola pikirnya pun menjadi lebih maju karena mendapatkan pendidikan yang tinggi dan layak”.

Pengujian pengaruh koefisien X_4 (rasio ketergantungan) terhadap kemiskinan

Dengan taraf nyata (α) = 0,05 ; t tabel = 1,667 , t hitung = 11,976 dan nilai signifikan t hitung sebesar 0,000 dengan demikian maka t hitung = 11,976 > 1,667 maka H_0 di tolak dan H_1 diterima dan nilai signifikansi 0,000 < dari (α) = 5 persen atau 0,05 maka H_0 di tolak dan H_1 diterima.

Hasil perhitungan uji t tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi X_4 atau rasio ketergantungan adalah sebesar 2,701 yaitu bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,050. Hal ini

menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, maka hipotesis keempat diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Slamet Priyo (2014) berdasarkan hasil analisis regresi dapat dijelaskan bahwa variabel rasio ketergantungan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kab. Brebes tahun 2009 sampai 2011. Artinya apabila rasio ketergantungan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

SIMPULAN

Variabel pengangguran (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2), tingkat pendidikan (X_3) dan rasio ketergantungan (X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2018.

Pengujian pengaruh secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen digunakan uji t , pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan artinya semakin tinggi pengangguran yang dimiliki maka akan meningkatkan kemiskinan. Variabel Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah yang dimiliki maka akan meningkatkan kemiskinan. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki maka akan menurunkan kemiskinan. Variabel

rasio ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan artinya semakin tinggi rasio ketergantungan yang dimiliki maka akan meningkatkan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

SARAN

1) Bagi Pemerintah

Guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, diperlukan campur tangan pemerintah salah satunya pemerintah sebagai wadah dalam mensejahterahkan masyarakat yaitu dengan memperbanyak lapangan pekerjaan formal dan sektor industri bersifat padat karya untuk menyerap tenaga kerja dari keluarga miskin atau kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dan keterampilan seseorang guna bersaing di masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhitungkan pengeluaran pada program yang berkaitan dengan upaya mengikis angka kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Serta memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu dan diharapkan ini akan memperbaiki kualitas SDM dan juga memperbaiki kualitas dari proses belajar, meningkatkan program KB, serta memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak.

2) Bagi Masyarakat

Dalam penanganan kemiskinan tidak hanya dapat dilakukan dengan program-program yang sudah ada, tetapi sebagai masyarakat turut andil dan mampu berinovasi, menggali potensi dalam diri pada segala bidang

dan sektor untuk meningkatkan perekonomian. Dengan memiliki bekal SDM yang berkualitas maka akan tercipta kesejahteraan dan efektifitas bagi masyarakat. Serta masyarakat ikut serta terlibat dalam kebijakan pemerintah guna menekan angka kemiskinan yang terjadi.

REFERENSI

- Abdillah, Jaya, Vinc.Hadi Wiyono, Bhimo Rizky Samudro. (2019). Analysis of Consumption Pattern and Poverty in Central Java. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*. Vol. 6, No. 3.
- Adi Putra, I Komang Agus. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 7(3): 416-444.
- Arndt, H. W., & Sundrum, R. M. (1980). Employment, Unemployment and Under-Employment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 16(3), 61–82.
- Astrini, Ni Made Myanti dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8), pp: 384-392.
- Aristina, Ita., Made Kembar Sri Budhi., I G.A.P. Wirathi., Ida Bagus Darsana. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 6(5): 677-704.
- Awan, Masood Sarwar, Nouman Malik, Haroon Sarwar, Muhammad Waqas. 2019. Impact Of Education On Poverty Reduction. *International Journal of Academic Research*. Vol. 3. No. 1. January, Part II.
- Ayu Purnama Margareni, Ni Putu, I Ketut Djayastra, I.G.W Murjana Yasa. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol. XII No. 1 : 101 – 110.
- Badan Pusat Statistik. (2012). Bali Dalam Angka Tahun 2012. Bali: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat statistik. (2018). Profil Kemiskinan di Indonesia maret 2018. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Cutler, D. M., & Katz, L. F. (1991). Macroeconomic Performance and the Disadvantaged. *Brooking Papers on Economic Activity* , 1-74.
- Dewi Utami, Ni Putu, Surya Dewi Rustariyuni. 2016. Pengaruh Variabel

- Sosial Demografi terhadap Keputusan Penduduk Lanjut Usia Memilih Bekerja di Kecamatan Kediri. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 9 No. 2.
- Dian Purnama Yanthi, Cokorda Istri, A.A.I.N. Marhaeni. 2015. Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Volume XI No. 2: 68-75.
- Franca, Obi. 2015. Quality Entrepreneurial Education: Opportunities for Youth Development, Unemployment and Poverty Reduction in Nigeria. *Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER)*. Vol.2, N0.1.
- Harfina, Dewi. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terselubung di Pedesaan Jawa Tengah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol.IV No.1.
- Hidayah, Muhit Nur dan Lukman Hakim. 2019. Supply Side Studies That Affect Educated Unemployed in Central Java, Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*. Vol. 6, No. 1.
- Inna Dariwardani, Ni Made. 2014. Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas Panel 2008 – 2010. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 7 No. 1.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi edisi 4*. Jakarta: Erlangga, hal. 198.
- Kurniawan, Jarot. 2016. Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 9 No. 1.
- Mandang, E.F, B.Lumanauw., M.B.Walangitan. (2017). Relationship Of Training And Education To Employee Performance At PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Cabang Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.5 No.3 September 2017, Hal.4324-4335 ISSN 2303-1174.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Marhaeni, A.A.I.N dan I G.A Manuati Dewi. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Marmujiono, Slamet Priyo. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Brebes Tahun 2009-2011. *Economics Development Analysis Journal* 3 (1).
- Nurlina. (2015). The effect of government expenditures on Indonesia economic growth. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*. Vol. 18, No. 1, April – July 2015, pages 1 – 14.
- Ordine, P., Rose, G. 2015. Educational Mismatch and Unemployment Scarring. *International Journal of Manpower*, 36, 5, 733-763.

- Piotrowska, Maria. 2016. The Direct And Indirect Effect Of The Pro-Poor Growth. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Volume 18, Nomor 3 Department of Economics, Wroclaw University of Economic.*
- Purnomo, S. D., Istiqomah., & Suharno. (2020). The Effect Ethnic on Poverty in DIY Province. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Faculty of Economics and Business Unsoed*, 13(1). ISSN 1979-715X.
- Puspito Sari, Deffi Ayu dan higeказu Kawashima. (2010). Poverty Mapping And Poverty Analysis In Indonesia. *International Program of Human Security Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University.* Vol 28, No 1.
- Putri Wahyuni, I Gusti Ayu, Made Sukarsa, Ni Nyoman Yuliarmi. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.* 3(8): 458-477.
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.* Vol. 10 No. 2.
- Sri Budhi, Made Kembar. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.* Vol. 6 No. 1.
- Suda Pratama, Nengah Rai Narka dan Made Suyana Utama. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud.* 8(7): 651-680.
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, Daniel Suryadarma. 2020. Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies.* 56:2, 175-192.
- Tisniwati, Baiq. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* Vol 10 No. 1.
- Titu, Mihail, Ilie Banu, Ioana-Madalina Banu. (2012). Demographic and Economic Dependency Ratios – Present and Perspectives. *International Journal of Economics and Finance.* Vol. 4, No. 12.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan.* Jakarta: Erlangga.
- Yao, Guevera Assamoi. 2007. Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence. Economics Dissertations. Georgia: Georgia State University.
- Yuliarmi, Ni Nyoman, A.A.I.N Marhaeni, I. A. N. Saskara, Sudarsana Arka, Ni L. P. Wiagustini. 2014. Keberdayaan Industri Kerajinan Rumah Tangga Untuk Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali (Ditinjau dari Aspek Modal Sosial dan Peran Lembaga Adat). *PIRAMIDA*

Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Vol. X No. 1 : 19 – 28.

Yusuf, Arief Anshory dan Andy Sumner. 2015. Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies.* 51:3, 323-348.